

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Urumb dalam Pengembangan Wisata Pantai Anasai Berbasis Partisipasi Masyarakat

Syahrudin^{1✉}, Eduardos E Maturbongs², Fitriani³, Samuel Atbar⁴, Vincenzo R Serano⁵,
Welhelmina Jeujan⁵, David Laiyan⁶, Antonius Nggewaka⁷

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

^{4,5,6,7} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

Alamat Email syahrudin@unmus.ac.id

Abstrak

Pantai Anasai di Kampung Urumb, Kabupaten Merauke, memiliki potensi wisata alam yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan destinasi wisata, promosi wisata berbasis digital, serta belum tersusunnya rencana pengembangan wisata yang terarah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Pantai Anasai berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*). Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas aparat kampung dan masyarakat Kampung Urumb. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep Community-Based Tourism, pengelolaan destinasi wisata, penyusunan rencana kerja, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi wisata. Selain itu, kegiatan ini mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan wisata, menyusun gagasan pengembangan destinasi, serta memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah kampung. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai modal awal pengembangan Wisata Pantai Anasai yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; partisipasi masyarakat; wisata berbasis masyarakat; Pantai Anasai; Kampung Urumb.

Abstract

Anasai Beach in Urumb Village, Merauke Regency, has significant natural tourism potential that can contribute to improving community welfare. However, this potential has not been optimally managed due to limited community knowledge regarding tourism destination management, digital tourism promotion, and the absence of a structured tourism development plan. This community service program aimed to enhance community knowledge and participation in the development of Anasai Beach through a community-based tourism approach. The program employed participatory methods consisting of socialization, training, and mentoring using the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The activities were conducted in June 2026 and involved 30 participants consisting of village officials and local community members. The results indicate an improvement in participants' understanding of the principles of Community-Based Tourism (CBT), tourism destination management, tourism planning, and the utilization of digital media for destination

promotion. Furthermore, the program increased community awareness and participation in maintaining environmental cleanliness, preparing preliminary tourism development plans, and strengthening collaboration between the local community and village government. These activities have contributed to enhancing community capacity as an essential foundation for sustainable and community-based tourism development at Anasai Beach.

Keywords: *community empowerment; community participation; community-based tourism; Anasai Beach; Urumb Village.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pariwisata tidak hanya berperan sebagai sumber devisa negara, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai budaya, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Perkembangan paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi semata-mata pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Pendekatan tersebut dikenal sebagai Community-Based Tourism (CBT), yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan (Murphy, 1985; Goodwin & Santilli, 2009).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengenali potensi yang dimiliki, mengambil keputusan secara mandiri, serta mengelola sumber daya lokal demi meningkatkan kesejahteraan. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai aktor yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya (Mardikanto & Soebiato, 2019; Adisasmita, 2006).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemberdayaan. Keberhasilan suatu program pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, hingga pengawasan dan evaluasi. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, menikmati hasil pembangunan, serta evaluasi program. Sementara itu, Arnstein (1969) melalui konsep Ladder of Citizen Participation menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan semakin berkualitas apabila masyarakat memiliki kekuasaan yang nyata dalam menentukan arah pembangunan, bukan sekadar menjadi penerima informasi atau pelaksana kebijakan.

Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam maupun budaya. Wilayah pesisir Merauke memiliki karakteristik pantai yang masih alami dengan keanekaragaman hayati, panorama laut, serta budaya masyarakat adat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata apabila dikelola secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan (Sunaryo, 2013; Yoeti, 2008).

Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pantai Anasai yang terletak di Kampung Urumb, Kabupaten Merauke. Pantai ini memiliki keindahan panorama pesisir, hamparan pasir, serta lingkungan yang masih relatif alami sehingga berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan daerah. Selain memiliki daya tarik alam, Kampung Urumb juga memiliki modal sosial berupa budaya gotong royong, nilai-nilai adat, serta hubungan sosial masyarakat yang kuat sehingga sangat mendukung penerapan konsep pariwisata berbasis

masyarakat (Community-Based Tourism). Namun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Sunaryo, 2013; Murphy, 1985).

Berdasarkan hasil observasi awal, pengembangan Wisata Pantai Anasai masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, minimnya fasilitas umum, rendahnya promosi destinasi, belum optimalnya kelembagaan pengelola wisata, serta terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan kepariwisataan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata masih belum berjalan secara maksimal sehingga masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari keberadaan destinasi wisata tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata masih memerlukan penguatan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata berkelanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2019; Tosun, 2000).

Tosun (2000) menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan dukungan pemerintah, serta kurangnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut juga sering ditemukan pada berbagai destinasi wisata di daerah berkembang sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata (Tosun, 2000; Sunyoto & Widayati, 2009).

Dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*), di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan wisata berbasis partisipasi masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Mardikanto & Soebiato, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat Kampung Urumb dalam pengembangan Wisata Pantai Anasai berbasis partisipasi masyarakat, mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pengelolaan destinasi wisata secara partisipatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Kampung Urumb, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata Pantai Anasai.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) yang menempatkan masyarakat Kampung Urumb sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi potensi, menganalisis permasalahan, merumuskan solusi, serta melaksanakan kegiatan pengembangan Wisata Pantai Anasai secara berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam proses pemberdayaan sehingga program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendidikan masyarakat melalui penyuluhan mengenai konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism*), pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, penerapan *Sapta Pesona*, pelestarian lingkungan pesisir, serta pemanfaatan potensi wisata sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Penyuluhan bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga serta mengembangkan Wisata Pantai Anasai secara berkelanjutan.

Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Materi pelatihan meliputi pengelolaan objek wisata, pelayanan kepada wisatawan (*hospitality*), pengelolaan kebersihan kawasan pantai, pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi wisata. Pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga

keterampilan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Metode berikutnya adalah difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) melalui pendampingan pemanfaatan teknologi sederhana dalam pengembangan wisata. Kegiatan ini dilakukan dengan membantu masyarakat menyusun profil destinasi Wisata Pantai Anasai, membuat media promosi berbasis digital, memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran wisata, serta menyusun papan informasi dan denah kawasan wisata. Penerapan teknologi sederhana tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperluas jangkauan promosi wisata kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian juga menerapkan metode mediasi dengan memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kampung Urumb, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, pelaku UMKM, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke. Mediasi dilakukan melalui forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana pengembangan wisata, serta membangun komitmen bersama dalam pengelolaan Wisata Pantai Anasai berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, kegiatan dilakukan melalui advokasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pembentukan atau penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penyusunan program kerja pengelolaan wisata, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta penyusunan strategi promosi destinasi wisata. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola destinasi wisata secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kampung Urumb.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Kampung Urumb, observasi lapangan, identifikasi potensi dan permasalahan, serta penyusunan materi penyuluhan dan pelatihan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, pendampingan, dan forum diskusi bersama masyarakat. Selanjutnya dilakukan pendampingan untuk memastikan masyarakat mampu menerapkan hasil pelatihan dalam pengelolaan Wisata Pantai Anasai. Pada tahap akhir dilakukan monitoring dan evaluasi melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, serta penyusunan rekomendasi sebagai tindak lanjut pengembangan Wisata Pantai Anasai berbasis partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di kawasan Pantai Anasai, Kampung Urumb, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata lokal melalui pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Kampung Urumb yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan wisata Pantai Anasai. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri atas aparat kampung, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Kampung Urumb. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut dimaksudkan agar proses pengembangan wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat dari keberadaan destinasi wisata Pantai Anasai.

Pelaksanaan kegiatan dirancang menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat hanya berperan sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, sejak awal kegiatan peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan kondisi riil yang dihadapi di lapangan, mengidentifikasi berbagai potensi wisata yang dimiliki Pantai Anasai, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan destinasi wisata. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga solusi yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Tahap pertama adalah sosialisasi, yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism). Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai konsep dasar pengelolaan destinasi wisata, manfaat ekonomi sektor pariwisata bagi masyarakat, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai, serta peran masyarakat dalam menciptakan destinasi wisata yang bersih, aman,

nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilakukan melalui diskusi interaktif sehingga peserta dapat menyampaikan pengalaman, aspirasi, dan berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pengembangan Pantai Anasai. Suasana diskusi berlangsung aktif karena sebagian besar peserta menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan wisata masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki arah pengembangan yang jelas.

Hasil diskusi pada tahap sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyadari besarnya potensi wisata Pantai Anasai, namun belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata kelola destinasi wisata. Beberapa peserta mengemukakan bahwa selama ini Pantai Anasai lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar pada waktu-waktu tertentu, sedangkan promosi kepada wisatawan dari luar daerah masih sangat terbatas. Selain itu, belum adanya perencanaan pengembangan kawasan wisata serta minimnya koordinasi antarwarga menyebabkan potensi wisata yang dimiliki belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat Kampung Urumb. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan pendampingan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap kedua adalah pelatihan, yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Materi pelatihan meliputi pengenalan prinsip-prinsip pengelolaan wisata berbasis masyarakat, penyusunan rencana kerja sederhana, pelayanan kepada wisatawan (*hospitality*), serta strategi promosi destinasi melalui media digital. Tim pengabdian juga memperkenalkan pentingnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif dan berbiaya rendah untuk memperkenalkan Pantai Anasai kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam sesi ini peserta diberikan contoh sederhana mengenai cara menyusun informasi wisata, memilih foto yang menarik, membuat narasi promosi, serta memanfaatkan platform digital sebagai media komunikasi dan promosi destinasi wisata.

Selama pelaksanaan pelatihan terlihat adanya antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh materi yang diberikan. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai cara mengelola objek wisata, menarik minat wisatawan, menjaga kebersihan kawasan pantai, serta membangun kerja sama antarwarga dalam mengembangkan wisata. Diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat, dari yang sebelumnya menganggap pengembangan wisata sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah menjadi kesadaran bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mulai membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata.

Tahap terakhir adalah pendampingan, yang dilakukan untuk membantu masyarakat menerapkan materi yang telah diperoleh selama sosialisasi dan pelatihan. Pada tahap ini tim pengabdian memfasilitasi peserta dalam mengidentifikasi potensi wisata yang dapat dikembangkan, mendiskusikan kebutuhan pengelolaan kawasan wisata, serta menyusun gagasan awal mengenai rencana pengembangan Pantai Anasai. Pendampingan juga diarahkan pada penyusunan langkah-langkah promosi wisata yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui pemanfaatan media digital dan jejaring sosial yang dimiliki. Melalui proses pendampingan ini masyarakat mulai memahami pentingnya penyusunan program kerja sebagai pedoman dalam pengembangan destinasi wisata sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bersifat insidental, tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mampu menciptakan ruang belajar bersama bagi masyarakat Kampung Urumb. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan Pantai Anasai sebagai salah satu potensi wisata daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengabdian telah menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas masyarakat menuju pengelolaan destinasi wisata yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan, sebagaimana konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019).

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Wisata

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi, observasi selama kegiatan, serta interaksi antara tim pengabdian dan peserta, diketahui bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar masyarakat Kampung Urumb belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep pengelolaan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan. Masyarakat pada umumnya memandang Pantai Anasai sebagai kawasan wisata alam yang secara alami telah memiliki daya tarik sehingga belum memerlukan pengelolaan yang terstruktur. Pandangan tersebut menyebabkan pengembangan kawasan wisata lebih banyak berjalan

secara spontan tanpa adanya perencanaan, pembagian peran, maupun strategi pengembangan yang jelas. Akibatnya, potensi wisata yang dimiliki belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah kampung.

Kondisi awal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya aspek manajemen dalam pengelolaan destinasi wisata. Sebagian besar peserta menganggap bahwa keberhasilan suatu objek wisata hanya bergantung pada keindahan alam yang dimiliki, sementara faktor-faktor lain seperti pelayanan kepada wisatawan, kebersihan kawasan, keamanan, promosi, serta kelembagaan pengelola wisata belum menjadi perhatian utama. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki pengalaman dalam menyusun rencana kerja pengembangan wisata, menentukan prioritas kegiatan, maupun membangun kerja sama antarwarga dalam mengelola kawasan wisata secara berkelanjutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata lokal secara profesional.

Hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan pada awal kegiatan juga memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam melakukan promosi destinasi wisata masih sangat terbatas. Sebagian besar peserta belum memahami cara memperkenalkan potensi wisata melalui media digital, seperti media sosial atau platform promosi daring lainnya. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola promosi sektor pariwisata, di mana wisatawan saat ini lebih banyak memperoleh informasi mengenai destinasi wisata melalui internet dan media sosial. Keterbatasan kemampuan tersebut menyebabkan Pantai Anasai belum banyak dikenal oleh masyarakat di luar Kampung Urumb, sehingga jumlah kunjungan wisatawan masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang promosi digital menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar Community-Based Tourism (CBT), yaitu suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, menjaga kualitas lingkungan, memberikan pelayanan kepada wisatawan, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Penyampaian materi yang dilakukan secara dialogis memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaitkan teori dengan kondisi nyata yang dihadapi di Kampung Urumb sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif.

Tahap pelatihan semakin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan destinasi wisata secara terencana. Peserta diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan wisata, penyusunan rencana kerja sederhana, strategi pelayanan kepada wisatawan (hospitality), serta teknik promosi destinasi melalui media digital. Dalam sesi diskusi, peserta juga diberikan contoh mengenai penyusunan konten promosi wisata yang menarik dengan memanfaatkan telepon pintar dan media sosial yang telah mereka gunakan sehari-hari. Pendekatan tersebut memberikan pengalaman baru bagi masyarakat bahwa promosi wisata tidak selalu memerlukan biaya yang besar, tetapi dapat dilakukan secara sederhana melalui pemanfaatan teknologi digital yang mudah diakses.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman masyarakat setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Peserta mulai menyadari bahwa pengembangan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang baik, pengelolaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa promosi wisata merupakan bagian penting dalam meningkatkan daya tarik destinasi sehingga informasi mengenai Pantai Anasai dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kesadaran tersebut mendorong munculnya komitmen masyarakat untuk mulai memperkenalkan potensi wisata kampung melalui media sosial dan berbagai kegiatan promosi lainnya yang dapat dilakukan secara mandiri.

Perubahan pengetahuan masyarakat juga terlihat dari meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata, memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, serta membangun citra positif Pantai Anasai sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menarik untuk dikunjungi. Masyarakat mulai memahami bahwa keberhasilan pengembangan wisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga kampung. Dengan demikian, keberadaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali potensi, memecahkan permasalahan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Demikian pula Mardikanto dan Soebiato (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dalam konteks pengembangan Wisata Pantai Anasai, peningkatan pengetahuan yang diperoleh masyarakat menjadi modal awal yang sangat penting untuk membangun tata kelola destinasi wisata yang lebih partisipatif, profesional, dan berkelanjutan.

Hasil pengabdian ini juga menguatkan konsep Community-Based Tourism yang dikemukakan Murphy (1985) bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya wisata yang dimiliki. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kapasitas yang baik akan lebih mudah beradaptasi terhadap perkembangan sektor pariwisata, mampu menciptakan inovasi dalam promosi destinasi, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan merupakan fondasi penting dalam mendukung pengembangan Pantai Anasai sebagai destinasi wisata berbasis partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Anasai

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan destinasi wisata, kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Pantai Anasai. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat karena masyarakat lokal merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan sumber daya wisata dan sekaligus menjadi penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, seluruh rangkaian kegiatan pengabdian dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat sejak proses identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga penyusunan langkah-langkah pengembangan destinasi wisata.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pantai Anasai masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan peserta, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Akibatnya, masyarakat lebih banyak menunggu adanya program atau bantuan dari pemerintah dibandingkan mengambil inisiatif untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai potensi wisata yang terdapat di Pantai Anasai belum dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya koordinasi, pembagian peran, maupun kesepakatan bersama mengenai arah pengembangan destinasi wisata.

Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, mulai terlihat adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pengembangan wisata. Selama proses diskusi berlangsung, peserta secara aktif menyampaikan berbagai ide, masukan, dan pengalaman mengenai kondisi Pantai Anasai serta potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Beberapa peserta mengemukakan perlunya menjaga kebersihan kawasan pantai, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, memperbaiki kenyamanan pengunjung, serta meningkatkan promosi wisata melalui media sosial. Keterlibatan peserta dalam menyampaikan pendapat menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk ikut berkontribusi dalam proses pengembangan destinasi wisata.

Partisipasi masyarakat juga terlihat pada saat kegiatan pendampingan, di mana peserta bersama aparat kampung berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Pantai Anasai secara bertahap. Masyarakat mulai memahami pentingnya menyusun rencana kerja sederhana sebagai pedoman dalam pengelolaan wisata sehingga setiap kegiatan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa keberhasilan pengembangan wisata memerlukan kerja sama antara pemerintah kampung, masyarakat, pemuda, dan berbagai pihak lainnya sehingga pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada satu pihak saja.

Perubahan partisipasi masyarakat juga tercermin dari meningkatnya kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan Pantai Anasai. Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan komitmennya untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan. Kesadaran tersebut merupakan perkembangan yang positif karena masyarakat mulai memahami bahwa kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari daya tarik wisata. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga menunjukkan minat untuk memperkenalkan Pantai Anasai kepada masyarakat luar melalui media sosial dan jejaring komunikasi yang mereka miliki. Walaupun kegiatan promosi tersebut masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, munculnya inisiatif dari masyarakat merupakan indikator bahwa partisipasi telah berkembang dari sekadar menerima informasi menjadi mulai melakukan tindakan nyata.

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan mulai tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap Pantai Anasai sebagai aset bersama yang harus dijaga dan dikembangkan. Rasa memiliki tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat karena keberlanjutan suatu destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan potensi wisata yang dimiliki. Ketika masyarakat merasa memiliki destinasi wisata, maka mereka akan terdorong untuk menjaga kebersihan kawasan, memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung

pengembangan pariwisata.

Dalam perspektif teori partisipasi masyarakat, temuan ini menunjukkan adanya perubahan menuju partisipasi yang lebih aktif. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi program. Berdasarkan hasil pengabdian, masyarakat Kampung Urumb telah mulai terlibat dalam proses identifikasi potensi, penyampaian aspirasi, penyusunan gagasan pengembangan wisata, serta perencanaan awal pengelolaan Pantai Anasai. Meskipun tingkat partisipasi tersebut masih berada pada tahap awal, kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dibandingkan sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan oleh Arnstein (1969). Arnstein menyatakan bahwa kualitas partisipasi masyarakat akan meningkat apabila masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan. Dalam kegiatan pengabdian ini, masyarakat tidak hanya menerima materi sosialisasi, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi, mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, serta menyusun langkah-langkah pengembangan wisata bersama aparat kampung. Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dilakukan telah membuka ruang dialog yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan destinasi wisata.

Hasil pengabdian ini juga sejalan dengan konsep Community-Based Tourism yang dikemukakan Murphy (1985) bahwa masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata karena mereka merupakan pihak yang paling memahami potensi, karakteristik, dan kebutuhan wilayahnya. Goodwin dan Santilli (2009) menambahkan bahwa keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh potensi alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, serta pembagian manfaat dari kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, meningkatnya partisipasi masyarakat Kampung Urumb setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan pengembangan Wisata Pantai Anasai yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat masih memerlukan tindak lanjut melalui pendampingan yang berkesinambungan. Masyarakat masih membutuhkan dukungan dalam penyusunan program kerja, penguatan kelembagaan pengelola wisata, peningkatan kemampuan promosi digital, serta pembangunan jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata. Pendampingan yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas masyarakat sehingga partisipasi yang telah tumbuh tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan destinasi wisata yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah menjadi langkah awal dalam membangun budaya partisipatif masyarakat Kampung Urumb dalam mengembangkan Pantai Anasai sebagai destinasi wisata unggulan berbasis masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Pantai Anasai, Kampung Urumb, Kabupaten Merauke, telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep Community-Based Tourism (CBT), pentingnya pengelolaan destinasi wisata secara terencana, strategi promosi wisata berbasis media digital, serta perlunya penyusunan rencana kerja sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan wisata. Kegiatan ini juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Pantai Anasai. Masyarakat mulai menunjukkan inisiatif untuk menjaga kebersihan kawasan wisata, menyusun gagasan awal pengembangan destinasi, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi wisata. Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat, aparat kampung, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya dalam penguatan kelembagaan pengelola wisata, penyusunan program kerja, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang promosi dan tata kelola destinasi wisata. Temuan pengabdian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Peningkatan pengetahuan yang diikuti dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Dinas Pariwisata perlu terus diperkuat agar potensi

Wisata Pantai Anasai dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Urumb sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). Membangun desa partisipatif. Graha Ilmu.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. Cornell University.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? ICRT Occasional Paper No. 11. Leeds Metropolitan University.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.
- Sunaryo, B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Aref, F., Gill, S. S., & Aref, F. (2010). Tourism development in local communities: As a community development approach. *Journal of American Science*, 6(2), 155–161.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in practice. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2353–2371. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1843048>
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. *Tourism Management*, 34, 37–46. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.007>
- Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2011). Developing a community support model for tourism. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 964–988. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.01.017>
- Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions, community participation and support for tourism development. *Tourism Management*, 60, 147–158. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.019>
- Suansri, P. (2003). Community based tourism handbook. Responsible Ecological Social Tour (REST), Thailand.
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- UNWTO. (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. World Tourism Organization.
- World Bank. (2021). Indonesia economic prospects: Boosting the recovery. World Bank.